

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang sedang berlangsung tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penaggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir - akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa¹.

Dalam upaya untuk menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat maka hukum harus ditegakkan, ditandai bahwa setiap kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum harus mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran itu sendiri. Sanksi terdiri atas berbagai macam bentuk yang bertujuan memberikan keadilan, tidak saja kepada korban tetapi juga sebagai tata nilai yang merekatkan tatanan kehidupan bermasyarakat.

¹ A. Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Jakarta :Sinar Grafika, 1994 , hal.6

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganannya itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Penegak hukum yakni Polisi, dalam melakukan penegakan dibutuhkan keterampilan, kecermatan dengan sarana dan prasarana memadai. Disamping itu bantuan wawasan keilmuan yang cukup terutama dalam mengungkap yaitu kriminalistik. Seiring perkembangan zaman angka kriminalitas di Indonesia terbilang cukup tinggi dari tahun ke tahunnya. Ini menggambarkan cita-cita Negara ini diranah penegakan hukum masih jauh dari apa yang diinginkan, meskipun aparat penegak hukum beserta undang-undangnya nyaris tanpa celah untuk dilanggar, namun kenyataannya masih didapati tindak pidana yang dilakukan berbagai oknum tertentu di Negara ini.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini berkembang pengaruh pemakaian obat-obatan di kalangan masyarakat. Hal

² Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta,1984) hal.1

ini sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, dan salah satu yang paling marak saat ini adalah masalah narkoba dan psikotropika. Masalah penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkoba dan Bahan/ Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Perkara penyalahgunaan narkoba yang termasuk hukum pidana khusus diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Undang – Undang tersebut yang mengatur tentang wewenang penyidik dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba diperluas, di antaranya ada wewenang melakukan tes urine. Sedangkan tes urine ini termasuk pemeriksaan kriminalistik, tetapi dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak di tulis secara jelas sebutan atas nama kriminalistik. Berkaitan dengan hukum acara perkara penyalahgunaan narkoba, Kitab Undang – Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP) masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Jumlah yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Blitar, Tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Jika setahun lalu, hanya ada 54 perkara, kini di pertengahan tahun sudah mencapai 60 Perkara .³

Hingga Bulan Juli 2016 kemarin, papar dia, ada 60 perkara narkoba. Mulai dari sabu-sabu, ganja dan pil dobel L. Dari 60 perkara itu, jumlah tersangkanya juga sebanyak 60 orang. Satu di antaranya, berstatus PNS di Pemkot Blitar, Syt. Warga Kota Blitar ini ditangkap saat akan bertransaksi di tepi jalan Ahmad Yani, Kota Blitar. Dari tangan dia, petugas menyita 3 gram sabu-sabu, yang disembunyikan di saku celananya. Yang membuat heran petugas, dari 60 pelaku yang ditangkap itu, rata-rata mereka bekerja serabutan.⁴ Itu artinya, para pengedar telah memanfaatkan para pemuda, yang tak punya pekerjaan tetap. Bisa jadi, awalnya mereka diimingi-

³ Sadar BNN Desember 2016 / Adi KSG IV, *Mahalnya Biaya Rehabilitasi Korban Narkoba*, tanggal 08 Januari 2007, [http://www.google .com](http://www.google.com), diakses tanggal 27 Mei 2017

⁴ Surya Malang, <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/08/11/kasus-narkoba-di-kabupaten-blitar-melambung-tinggi-jika-dibandingkan-tahun-lalu> Diakses pukul 19.05 WIB, Tanggal 12 agustus 2016

imingi penghasilan lebih besar, dengan tanpa modal. Namun, setelah mereka ketagihan atau jadi pemakai, akhirnya malah nekat jadi pengedar juga.

Penyebab penyalahgunaan NAPZA sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat (NAPZA). Tidak terdapat adanya penyebab tunggal (*single cause*). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan NAPZA adalah sebagian berikut: ⁵

1. Faktor individu :

Kebanyakan penyalahgunaan NAPZA dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan NAPZA. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna NAPZA.

2. Faktor Lingkungan :

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor keluarga, terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna NAPZA.

3. Faktor Napza

- a. Mudahnya NAPZA didapat dimana-mana dengan harga “terjangkau”
- b. Banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba
- c. Khasiat farakologik NAPZA yang menenangkan, menghilangkan nyeri, menidur-kan, membuat euforia/fly/stone/high/teler dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahguna NAPZA. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna NAPZA.

Sampai saat ini penyalahgunaan narkoba di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan narkoba makin hari

⁵ *Ibid*

makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu. Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1900-an masalah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai Negara transit saja. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan Negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai Negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.⁶

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang narkoba dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang mengatursanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik POLRI serta para penegak hukum lainnya, bahwa dalam proses penegakan hukum dalam hal ini pene

⁶ Mulyono, Liliawati, Eugenia, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta :Harvarindo, 1998), hal.5

gakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropik, untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika. Peran penting penyidik di kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika maupun psikotropika. Disamping itu hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 Tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin marak dewasa ini.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas tentang pentingnya penyidikan dalam mengungkapkan dan membuat terang dugaan adanya penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika maka harus didukung dengan faktor pendukung yang dapat memfasilitasi jalannya proses penyidikan. Dalam hal penegakan hukum penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika memiliki sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan tindak pidana lain pada umumnya. Salah satu proses penegakan hukumnya dalam rangka penyidikan adalah dengan menciptakan dan atau menskenariokan suatu kondisi sebuah delik pidana atau peristiwa pidana narkotika maupun psikotropika tersebut. Penciptaan dan atau penskenariokan yang

dimaksud adalah dalam rangka untuk mengungkap jalur peredarannya dengan kata lain siapa

pengedarnya atau bahkan siapa yang menjadi produsen dari narkoba dan psikotropika tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara under cover buy (menyamar membeli kembali).

Dari permasalahan yang terurai di atas, penulis tertarik mengambil hal ini sebagai judul skripsi “**Kajian Kriminalistik terhadap Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Oleh Penyidik (Study di Kepolisian Resort Kabupaten Blitar)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka fokus permasalahan yang menjadi kajian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penyidik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dilihat dari ilmu kriminalistik ?
2. Hal apa yang menjadi kendala penyidik dalam penggunaan ilmu kriminalistik terkait penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyidik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dilihat dari ilmu kriminalistik.
2. Untuk mengetahui hal apa yang menjadi kendala penyidik dalam penanganan ilmu kriminalistik terkait penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wacana bagi masyarakat terkait dengan peranan kriminalistik oleh penyidik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.
- b. Sebagai sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Mahasiswa

Sebagai penambah pengetahuan kepada Mahasiswa untuk pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu kriminalistik. Dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan komprehensif.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk menambah wawasan tentang ilmu kriminalistik. Disamping itu masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana penyidikan penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat diketahui bahwa memang benar bahwa barang yang disita polisi itu narkoba. Di pihak lain, masyarakat dapat membantu polisi dengan melaporkannya, bila melihat ada barang yang demikian diperjual belikan, atau digunakan oleh anggota masyarakat.

c. Manfaat bagi Penyidik

Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian khususnya bagi pembuat kebijakan di lingkungan POLRI untuk dapat memperluas pemanfaatan kriminalistik, meningkatkan ilmu kriminalistik dengan penyesuaian perkembangan penyalahgunaan narkoba, dan melengkapi sarana dan prasarananya

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kriminalistik.
- b. Agar dapat menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai realitas penerapan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya yaitu ilmu kriminalistik
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi para pihak yang memerlukan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan⁷. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*). Artinya sebagai penelitian dengan menempatkan hukum

⁷Abdulkadir, Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 112.

sebagai gejala sosial yang memandang hukum dari segi luarnya. Penelitian ini dikaitkan dengan masalah sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum⁸. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana manfaat kriminalistik bagi penyidik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Polres Kabupaten Blitar.

2. Lokasi Penelitian

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Polres Kabupaten Blitar karena di dalam lokasi tersebut terdapat banyak dokumen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang hendak diperoleh berupa hasil wawancara, dokumentasi, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemanfaatan kriminalistik bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba.

b. Data Sekunder

Data yang hendak diperoleh berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini.

⁸ Peter Mahmud Marzuki.(2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 87

c. Data Tersier

Jenis data yang memberikan petunjuk atau keterangan data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, Glossary dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan wawancara terstruktur yang disiapkan oleh penulis. Dengan metode wawancara penulis menetapkan populasi dan sampel. Adapun yang menjadi populasi dan sampel adalah sebagai berikut : Populasi dan sampel responden dalam penelitian ini adalah responden dari pihak penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Blitar , yang dipilih dengan metode *purposive sampling*.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat maka digunakan dokumentasi berupa catatan dokumentasi tentang penyalahgunaan narkoba yang diperoleh melalui berbagai media dan kepustakaan.

c. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki yaitu tentang penyalahgunaan narkoba terhadap obyek yang menjadi permasalahan

yaitu pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Kabupaten Blitar.

d. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik termasuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung dalam proses penelitian. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Berupa himpunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan yang lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa studi kepustakaan yakni himpunan doktrin, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memamparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan cara reduksi data⁹. Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan yang melibatkan pihak penyidik dengan tersangka. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian melakukan reduksi data yaitu merangkum dari hasil data lapang tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji dalam permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁹ Nasution S.1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito. Bandung. Hlm. 52

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas yang terdiri dari pemanfaatan kriminalistik, fungsi penyidikan dan penyidik penyalahgunaan narkotika, pengertian kejahatan dan penyalahgunaan narkotika.

3. Bab III Pembahasan

Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara isi, mengkaji dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan.

4. Bab IV Penutup

Kesimpulan dan saran yang memuat uraian tentang kesimpulan umum dan saran yang berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah ada.